

Bedah Rumah Untuk Kesejahteraan Dan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu Di Gowa Kota Makassar

Djunaedi¹, Rahmat Pannyiwi², Djusmadi Rasyid³, Dian Meiliani Yulis⁴, Sastrika
Handayani Marpaung⁵

¹ Program Studi Ilmu Gizi, Stikes Salewangan Maros

² Program Studi Ilmu Keperawatan, Stikes Amanah Makassar

³ Program Studi Keperawatan, Akper Sawerigading Pemda Luwu

⁴ Program Studi S2 Promosi Kesehatan, Universitas Megarezky Makassar

⁵ Program Studi D3 Kebidanan, Universitas Putra Abadi Langkat

Abstract

Poverty causes families to be unable to meet the needs of adequate housing for themselves and their families. Not everyone is able to meet their housing needs for economic reasons. One of the basic human needs is a house in the context of decentralized housing provision. Currently, there is no housing provision system in the regions that is responsive to developing needs. This is due to the lack of developed understanding that housing is also a public matter apart from being an individual matter. The aim of implementing the House Renovation Program is targeting poor people who have uninhabitable houses. The house renovation program has had an impact on poverty alleviation in Gowa District, Makassar. Community Service Activities (PKM) by the Indonesian Teachers and Lecturers Association in collaboration with IKAT Japan South Sulawesi as a form of improving the problem of poverty for our underprivileged brothers and sisters with a house renovation program. Apart from alleviating the problem of poverty through this house renovation program, it is hoped that those who receive Mr. Ridwan's assistance will be helped by comfortable accessibility with their families.

Keywords: House Renovation, Community Welfare and Health, Disadvantaged, Gowa

Correspondence : Djunaedi

Abstrak

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

Kemiskinan menyebabkan keluarga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi diri dan keluarga, tidak semua orang mampu memenuhi kebutuhan perumahan karena alasan ekonomi. Salah satu dasar keperluan dasar manusia adalah rumah dalam konteks penyelenggaraan perumahan yang terdesentralisasi, saat ini belum tersedia sistem penyediaan perumahan di daerah yang tanggap terhadap perkembangan kebutuhan. Hal ini disebabkan belum berkembangnya pemahaman bahwa perumahan juga merupakan urusan publik selain urusan individu. Tujuan pelaksanaan Program Bedah Rumah yang sarannya masyarakat miskin yang mempunyai Rumah Tidak Layak Huni. Program bedah rumah berdampak terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Gowa Makassar. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) oleh Asosiasi Guru dan Dosen Seluruh Indonesia bekerjasama dengan IKAT Jepang Sulawesi Selatan sebagai bentuk memperbaiki masalah kemiskinan kepada saudara saudara kita yang kurang mampu dengan program bedah rumah. Selain mengentaskan masalah kemiskinan melalui program bedah rumah ini diharapkan yang mendapatkan bantuan Bapak Ridwan ini dapat terbantuan secara aksesibilitas yang nyaman bersama keluarga.

Kata Kunci : Bedah Rumah, Kesejahteraan Dan Kesehatan Masyarakat, Tidak Mampu, Gowa

Korespondensi : Djunaedi

I. PENDAHULUAN

Pada Pasal 1 UU RI Nomor 1 tahun 2011 disebutkan rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. (Blaang, 1986), juga mengungkapkan bahwa perumahan merupakan salah satu unsur pokok dari kesejahteraan rakyat dan dipandang sebagai salah satu fasilitas dasar bagi berhasilnya rencana pembangunan, serta mempunyai arti bagi sarana yang dapat memberi jasa-jasa bagi kelancaran kegiatan-kegiatan di bidang

sosial, ekonomi dan administrasi pemerintahan.

Pesatnya pertumbuhan penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah yang terbatas sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya seringkali tidak diimbangi dengan kemampuan pemenuhan kebutuhan perumahan yang memadai. Fenomena ini terlihat pada masyarakat yang tidak mampu untuk memperbaiki rumah mereka akibat perekonomian yang terbatas, sehingga rumah tersebut dibiarkan menjadi lapuk dan tidak terurus. Rumah yang mereka huni jauh dari syarat keselamatan bangunan, dinding dari bambu-bambu dan kayu dengan kualitas rendah, lantai rumah yang masih dari tanah dan berbagai halnya yang masih jauh dari syarat sebagai rumah layak huni. Oleh sebab itu, perbaikan perumahan bagi masyarakat miskin sangat diperlukan.

Hak pemenuhan atas rumah menjadi salah satu komponen penting yang perlu diperhatikan pemerintah karena kondisi rumah yang dimiliki masyarakat miskin dibangun dengan tidak memperhatikan kriteria fisik rumah yang layak huni. Pentingnya perbaikan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dijelaskan dalam UU RI No 1 tahun 2011 yang menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah perlu memberikan kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dalam bentuk pemberian kemudahan pembiayaan dan/atau pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan hunian.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman tidak hanya melakukan pembangunan baru, tetapi juga melakukan pencegahan serta pembenahan perumahan dan kawasan permukiman yang telah ada dengan melakukan pengembangan, penataan, atau peremajaan lingkungan hunian perkotaan atau perdesaan serta pembangunan kembali terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Selain itu salah satu hal khusus yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah keberpihakan negara terhadap masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memenuhi

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah itu dengan memberikan kemudahan, berupa pembiayaan, pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum, keringanan biaya perizinan, bantuan stimulan, dan insentif fiskal.

Bantuan dan kemudahan yang dimaksud adalah dukungan dana dan kemudahan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan rumahnya. Salah satu program pembangunan perumahan dan permukiman yang telah dijalankan pemerintah daerah dan bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi hak dasar berupa rumah yang layak huni adalah Program Bedah Rumah.

Program ini merupakan program prioritas yang sedang dijalankan pemerintah bagi masyarakat yang mempunyai Rumah Tidak Layak Huni dalam rangka mensejahterakan masyarakat dan dibentuk dengan harapan mengentaskan kemiskinan sehingga meningkatnya kualitas rumah masyarakat miskin dan kurang mampu agar menjadi lebih layak untuk di huni. Program ini sangat sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman (1999), yang menyebutkan untuk memberikan perhatian, dukungan, perlindungan, layanan dan kepastian hukum yang jelas keberpihakannya kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah terutama yang membangun rumahnya secara swadaya.

Program Bedah Rumah juga diyakini sebagai program yang efektif mengingat bahwa banyaknya rumah tidak layak huni di Kota Makassar. Pada pelaksanaannya Program Bedah Rumah telah mempunyai suatu pedoman pelaksanaan yang harus dijalankan. Namun jika dilihat secara kasat mata, program ini belum sepenuhnya dibangun dengan memenuhi kualitas yang diharapkan penerima Program Bedah Rumah. Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

mengevaluasi pelaksanaan Program Bedah Rumah ini apakah sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang telah ditetapkan atau tidak.

II. METODE

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan survey dengan mengamati, berdiskusi dengan warga sekitar terkait dengan permasalahan yang dihadapi dan masalah teknis atau regulasi bedah rumah. Dari diskusi tersebut tim bersama mitra dan masyarakat sepakat untuk membantu proses dalam bedah rumah yang akan di aplikasikan untuk salah satu. Langkah berikutnya akan di jelaskan secara detail yang dimulai dari Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Akhir dan anggaran biaya bedahrumah.

A. Tahap Persiapan

- Melakukan survei ke lokasi untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh terkait pelaksanaan bedah rumah.
- Penentuan lokasi yang tepat sasaran
- Dokumentasi rumah dan permasalahan terjadi

B. Tahap Pelaksanaan

- Tim pengabdian membuat gambar rancangan (desain) yang disetujui oleh dan mitra
- Menghitung rencana anggaran biaya
- Mengaplikasikan gambar rancangan yang dibantu oleh pekerja masyarakat setempat

C. Tahap Akhir

- Program bedah rumah ini dilaksanakan oleh Asosiasi Guru dan Dosen Seluruh Indonesia bekerjasama IKAT Jepang Sulawesi Selatan dengan bergotong royong menyelesaikan bedah rumah dan serah terima kepada penerima program ini.

D. Anggara Biaya

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan anggaran biaya yang sudah sesuai dengan survei yang dilakukan, berikut secara detail Rincian Anggaran Biaya;

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil

Dalam survei yang dilakukan, penerima program bedah rumah ini adalah rumah tinggal yang tidak layak huni. Tidak layak huni tersebut dijelaskan beberapa kriteria; sebagai berikut:

- 1) Rumah tangga yang tidak berkebutuhan cukup memiliki sanak keluarga disabilitas
- 2) Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tidak ada.
- 3) Kesehatan kualitas lingkungan sangat buruk
- 4) Harus ada legalitas kepemilikan tanah

b. Pembahasan

Setiap tahun Asosiasi Guru dan Dosen Seluruh Indonesia melaksanakan program salah satunya adalah bedah rumah tidak layak huni. Program ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, seperti; Kampus Negeri maupun Swasta, Lembaga Sosial dan lain lain yang berperan sebagai mitra yang membantu proses persiapan sampai akhir. Penyelenggaraan bedah rumah ini dilandasi dengan kepedulian sosial untuk membantu masyarakat kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah. Kegiatan bedah rumah dilaksanakan melalui 3 tahapan yang akan dijelaskan secara detail, sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Penerima bedah rumah memenuhi kriteria yang akan digunakan sebagai sasaran untuk keluarga yang tidak mampu. Perencanaan Bersama dengan melakukan survei ke lokasi bertemu dengan

kelompok masyarakat.

Survei yang dilakukan dengan kelompok masyarakat diperlukan pelaksanaan, perlindungan dan pemenuhan hak. Selain itu pembahasan terkait dengan penyediaan aksesibilitas yang bermanfaat dan layak. Akomodasi yang layak diperlukan untuk menjamin keberlangsungan hidup dan yang terakhir pemilikan legalitas tanah milik sendiri.

2. Tahap Pelaksanaan

Program bedah rumah penyandang disabilitas layak huni dilaksanakan dengan melibatkan dosen fakultas Teknik dan perencanaan, masyarakat setempat dan tukang bangunan. Setelah mencari permasalahan dan solusi yang ditawarkan. Tim pengabdian akan membuat desain yang disetujui.

3. Tahap Akhir

Program bedah rumah ini dilaksanakan untuk membangun kepedulian sosial masyarakat. Pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik karena adanya Kerjasama dari berbagai praktisi maupun masyarakat. Terlaksananya bedah rumah membawa dampak positif bagi penerima serta meningkatkan peran dan fungsi sosial baik di dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat dapat disimpulkan berdasarkan hasil laporan dan hasil lapangan yang akan dijelaskan secara detail, sebagai berikut;

- 1) Rumah penerima program bedah rumah tidak layak huni serta membuat lingkungan kumuh sehingga membahayakan Kesehatan.
- 2) Desain rumah yang ramah terhadap penyandang disabilitas memberikan aksesibilitas memudahkan untuk beraktifitas sehingga bisa mandiri tanpa seseorang yang membantu.

- 3) Setelah penerima mendapatkan program bedah rumah kondisi menjadi percaya diri dan tidak minder dengan masyarakat lingkungan sekitar.
- 4) Keberhasilan program bedah rumah menjadikan rujukan kementerian sosial untuk membantu kegiatan sosial dalam bentuk mengurangi angka kemiskinan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

1. Anto, S., Andi Latif, S., Pannyiwi, R., Ratu, M., & Werdyaningsih, E. (2022). Analisis Beban Kerja Dengan Kinerja Perawat Dalam Pelaksanaan Asuhan Keperawatan. Barongko: Jurnal Ilmu Kesehatan, 1(1), 41–46. <https://doi.org/10.59585/bajik.v1i1.38>
2. Abidin, Said Zainal, (2018). Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
3. Agustinus, Leo. (2019). Politik dan Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Anggara
4. Arikunto, Suharsimi, (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta D.S. Van Meter dan C.E. Van Horn, (1995). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Ohio: State
5. Fauzi, Ahkmad. (2018). Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan : Teori dan Aplikasi. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
6. Guba, & Lincoln, (1998), Handbook of Qualitative Research, Competing Paradigm in Qualitative Research. Thousands Oaks: London, Sage Gunn,
7. Guntur, Muhammad, (2019). Analisis Kebijakan Publik. Makassar: Badan Penerbit
8. Gunung Agung Sudarwan, (2003), Riset Keperawatan Sejarah & Metodologi. Jakarta: EGC Sugiyono, (2010), Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
9. Hogwood, (2015), Policy Analysis, British Journal of Political Science
10. Hasna, H., Rante, A., Rasyid, D., Warda, W., & Sariati, M. (2023). Manajemen Perawatan Diri Untuk Meningkatkan Pengetahuan Keluarga Dan Pasien Gagal Jantung Di Desa Mendatte. Sahabat Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(3), 68–73. <https://doi.org/10.59585/sosisabdimas.v1i3.61>
11. Hill, Michael, & Hupe, Peter. (2014). Implementing Public Policy: An Introduction To The Study Of Operational Governance. Sage, 2014
12. Jenkins, (2019), Policy Analysis, Oxford: Martin Robertson Moleong, Lexy, J.

- (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja
13. Miles, and Huberman. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan
 14. Purwanto, Erwan Agus, Sulistyastuti, & Dyah Ratih. (2012), Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gawa Media Riyanto, (2012), Penelitian Kualitatif. Surabaya: Penerbit SIC Siagian, Sondang, (2012), Filsafat Administrasi. Jakarta:
 15. Rosda Mazmanian, & Sabatier (2014), Analisis Kebijakan Publik, New York: HarperCollins
 16. Subarsono. (2018). Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
 17. Sahya, (2018). Kebijakan Publik: Pustaka Setia, Bandung
 18. Susanti, R., Imran, A., Briliannita, A., Akbar, A., Yermi, Y., B, M., Pannyiwi, R., & Rasyid, D. (2023). Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Sahabat Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(3), 92–98. <https://doi.org/10.59585/sosisabdimas.v1i3.70>
 19. Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press Moleong, Lexy, J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Muhadjir, Noeng. (2010), Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin Nazir, Moh. (2009), Metode Penelitian. Bogor. Ghalia Indonesia Parsons, (1995), Public Policy. Cheltenham: Edward Elgar
 20. UNM Handoyo, Eko, (2018). Kebijakan Publik: Widya Karya, Semarang Hardani, dkk, (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif: Pustaka Ilmu, Yogyakarta